

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE di Kabupaten Bima: Implikasi terhadap Efektivitas Pelayanan Publik

Hidayatullah, Yudhi Lestanata, Ayatullah Hadi, Sadrul Imam

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Email: dayatafaro@gmail.com

Article Information

Submitted: 18 Mei 2024

Accepted: 28 Mei 2024

Online Publish: 28 Mei 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bima, Indonesia, dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan kualitas layanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melibatkan wawancara dengan para ahli dan tinjauan literatur untuk memahami fenomena secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bima memiliki keunggulan dalam layanan administrasi pemerintahan daerah berbasis elektronik, namun terdapat kelemahan pada manajemen audit dan infrastruktur TIK. Meskipun demikian, aplikasi modern seperti SIGESIT, SANTABE, LAMBARASA, ARLOOPA, dan SIDAK telah membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk mempertahankan keunggulan ini, diperlukan pemeliharaan sistem SPBE, peningkatan kompetensi SDM, dan penguatan infrastruktur. Fokus pada pengembangan TIK dan e-government serta peningkatan kualitas layanan publik diharapkan dapat mengatasi tantangan yang masih ada, menjadikan Kabupaten Bima sebagai contoh keberhasilan dalam penerapan teknologi untuk pelayanan publik.

Kata Kunci: *SPBE, Efektivitas, Pelayanan Publik, Implikasi, Kabupaten Bima*

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the Electronic-Based Government System (EBGS) in Bima Regency, Indonesia, focusing on improving the efficiency and quality of public services. The research method used is qualitative descriptive, involving interviews with experts and literature reviews to gain an in-depth understanding of the phenomenon. The results indicate that Bima Regency has strengths in electronic-based local government administrative services, but there are weaknesses in audit management and ICT infrastructure. Nevertheless, modern applications such as SIGESIT, SANTABE, LAMBARASA, ARLOOPA, and SIDAK have helped improve transparency and accountability. To maintain these strengths, maintenance of the EBGS system, enhancement of human resource competencies, and infrastructure strengthening are required. The focus on ICT and e-government development and improving the quality of public services is expected to address remaining challenges, making Bima Regency a model of success in technology application for public services.

Keywords: *EBGS, Effectiveness, Public Services, Implications, Bima Regency*

Pendahuluan

E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik serta informasi yang lebih baik (Ziomba & Papaj, 2012). Dengan perkembangan teknologi 4.0, program reformasi birokrasi di Indonesia

How to Cite

Hidayatullah, Yudhi Lestanata, Ayatullah Hadi, Sadrul Imam/Tingkat Kematangan Penerapan SPBE di Kabupaten Bima: Implikasi terhadap Efektivitas Pelayanan Publik/Vol 5 No 2 (2024)

<https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i2.370>

DOI
e-ISSN

2721-2246

Published by

Rifa Institute

didorong melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Fazil et al., 2024). Tujuan utamanya adalah untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku usaha, dan masyarakat dengan lebih efisien, transparan, dan efektif (Lytras & Şerban, 2020). Arahan Presiden Jokowi menekankan pentingnya kehadiran pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif. Oleh karena itu, penerapan SPBE atau e-government menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan publik (Suwarno & Wati, 2020); (Rodriguez-Hevía et al., 2020).

Teknologi informasi saat ini memiliki dampak signifikan pada kehidupan masyarakat, dan organisasi maupun perusahaan harus selalu menyikapi perkembangan teknologi ini untuk memberikan layanan terbaik (Hardi & Gohwong, 2020). Penerapan teknologi informasi dapat mengarahkan dan mengendalikan bisnis serta menciptakan struktur yang menghubungkan strategi dan tujuan pemerintah dengan proses teknologi informasi dan sumber daya yang ada. Konsep Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) yang mulai dikembangkan pada tahun 1998, menyatakan bahwa proses ini dirancang untuk memastikan bahwa TI mendukung dan memperluas strategi dan tujuan organisasi (Information, 2024). IT Governance mencakup serangkaian keputusan yang memastikan adanya alokasi penggunaan TI dalam strategi-strategi organisasi yang bersangkutan, memberikan manfaat, dan menjaga risiko pada tingkat yang dapat diterima. Menurut Ross, Jeane W (2004), IT Governance merupakan prosedur arahan penerapan pengaturan organisasi untuk mendukung pengelolaan TI secara integral dan menindaklanjuti sasaran serta strategi organisasi dengan tanggung jawab yang jelas (Kuswati et al., 2022).

Berdasarkan data dari E-Government Development Index (EGDI) yang dirilis oleh PBB, pada tahun 2019, Indonesia berada pada urutan ke-107 dengan nilai 0.52580, dan berhasil meningkat ke urutan 88 dengan nilai 0.66120 pada tahun 2020 (Karunia et al., 2023). Peningkatan ini menunjukkan bahwa Indonesia terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan implementasi e-government untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Pada masa pandemi COVID-19, WHO secara resmi mendeklarasikan virus corona sebagai pandemi pada 9 Maret 2020, dan pemerintah Indonesia menetapkan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Ariana et al., 2020). Pandemi ini memaksa instansi pemerintah dan sektor pendidikan, baik di pusat maupun daerah, untuk mengubah pola kerja dari yang biasanya hadir secara fisik di kantor menjadi bekerja dari rumah (*work from home*) dengan memanfaatkan teknologi informasi (Prihanto, 2012); (Ingrams et al., 2020).

Pemanfaatan teknologi informasi selama pandemi dilakukan melalui berbagai inisiatif seperti sistem pembelajaran jarak jauh, layanan publik pemerintah secara daring, pengembangan survei daring, penggunaan konferensi web, pengembangan telemedicine, implementasi chatbot untuk layanan publik, dan uji coba daring (Vázquez-López & Marey-Perez, 2021). Langkah-langkah ini memperlihatkan bahwa Indonesia semakin mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai good governance. Pandemi COVID-19 menjadi katalis bagi percepatan adopsi teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Gaufman, 2020). Dengan demikian, Indonesia berada pada jalur yang baik untuk meningkatkan kematangan SPBE, memastikan bahwa pelayanan publik dapat terus beradaptasi dan meningkatkan efisiensinya, serta mendukung upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Farida et al., 2020).

Percepatan implementasi e-Government di Indonesia merupakan salah satu intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan aparatur negara melalui Program Reformasi Birokrasi. Hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun

2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, yang bertujuan untuk mencapai birokrasi berkelas dunia. Dengan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, kualitas pelayanan publik diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, dan terjangkau. Dalam upaya mencapai tujuan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, yang mewajibkan semua instansi pemerintah untuk menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bentuk integrasi e-Government (Saputra & Frinaldi, 2023).

SPBE secara khusus ditempatkan dalam area perubahan tata laksana, di mana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh implementasi SPBE. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 59 Tahun 2020 mengatur tentang pemantauan dan evaluasi SPBE, yang merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah (Arman et al., 2022). Kemudian di perbarui melalui peraturan Menpan RB Nomor 23 Tahun 2023 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi di Indonesia memberikan panduan yang lebih rinci tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk mempercepat implementasi e-Government melalui SPBE. Roadmap ini mencakup strategi dan tindakan konkret untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan publik. Roadmap ini juga menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan SPBE, untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah terus meningkatkan kemampuannya dalam memanfaatkan teknologi digital (Alshehri et al., 2022); (Amaliah et al., 2023).

Pentingnya SPBE dalam reformasi birokrasi tidak bisa diabaikan. Dengan penerapan SPBE, diharapkan proses administrasi pemerintahan menjadi lebih streamlined, transparan, dan akuntabel (Budai & Tózsza, 2020). Ini akan membantu mengurangi birokrasi yang berlebihan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Roblek et al., 2020). Roadmap Reformasi Birokrasi 2023 juga menyoroti perlunya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur sipil negara untuk mengoperasikan dan memanfaatkan SPBE secara efektif. Selain itu, peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi fokus utama, untuk memastikan bahwa semua instansi pemerintah memiliki akses ke teknologi yang diperlukan untuk menerapkan SPBE dengan sukses (Haerofiatna & Chaidir, 2023)(Firman et al., 2023).

Salah satu aspek penting dari penerapan SPBE adalah peningkatan transparansi dalam pemerintahan. Dengan sistem yang terintegrasi, informasi dapat diakses dengan lebih mudah oleh publik, sehingga mengurangi peluang untuk korupsi dan meningkatkan akuntabilitas (Matitah et al., 2021). Selain itu, SPBE juga memungkinkan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat (Ullah et al., 2022). Misalnya, layanan administrasi yang biasanya memakan waktu lama dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien melalui platform digital. Ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik (Amaliah et al., 2023).

Dalam jangka panjang, penerapan SPBE diharapkan dapat membawa transformasi signifikan dalam cara pemerintah beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Dengan teknologi digital, pemerintah dapat mengumpulkan dan menganalisis data secara real-time untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan berdasarkan bukti (Pakhalov et al., 2020). Hal ini juga memungkinkan pemerintah untuk merespons dengan lebih cepat terhadap isu-isu dan tantangan yang muncul, serta mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran (Maulana, 2020). Selain itu, integrasi sistem digital juga memfasilitasi kolaborasi antarinstansi pemerintah, sehingga menciptakan sinergi yang lebih baik dalam pelaksanaan program dan layanan (Gupta et al., 2020).

Demikian penerapan SPBE merupakan langkah strategis dalam reformasi birokrasi di

Indonesia. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan, pemerintah tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga kualitas pelayanan publik (Maulana & Bafadhal, 2020); (Li et al., 2021). Roadmap Reformasi Birokrasi 2023 memberikan panduan yang jelas tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan ini, termasuk pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, dan pengembangan infrastruktur teknologi (Firmandayu & Elfaki, 2023). Dengan komitmen dan implementasi yang konsisten, SPBE dapat membawa transformasi positif yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, menuju birokrasi yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Utama, 2020); (Firman et al., 2023).

Pemerintah Kabupaten Bima melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintah Daerah di bidang komunikasi dan informatika, yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, telah menyikapi Tata Kepemerintahan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini diambil dengan melaksanakan visi Bupati Bima yang berorientasi pada pelayanan publik yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan ini, salah satu misi utamanya adalah "Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter," sesuai dengan pedoman pembangunan daerah Kabupaten Bima.

Sejalan dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Bima menerapkan konsep Smart City melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peta Proses Bisnis disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis bagi Instansi Pemerintah. Pemetaan ini dilakukan untuk mendukung penerapan SPBE, yang sangat berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi proses kerja di lingkungan pemerintahan daerah, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19 yang mengharuskan Pegawai Negeri Sipil bekerja dari rumah (work from home).

Penerapan SPBE di Kabupaten Bima juga menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, terutama dalam area penataan tata laksana. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada setiap perangkat daerah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan menerapkan SPBE yang menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan untuk mencapai keterpaduan secara nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 26 Tahun 2020. Evaluasi pelaksanaan SPBE merupakan bagian penting dalam proses ini untuk memastikan bahwa setiap aspek pelaksanaannya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bima menerapkan SPBE dengan nilai indeks SPBE sebesar 2.05 (skala 1-5) dan diberikan predikat Cukup. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa ada beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki. Dengan capaian indeks SPBE 2.05 dan predikat Cukup, jelas ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi area-area dengan nilai rendah pada indeks SPBE, dan rekomendasi diberikan untuk perbaikan di aspek-aspek tersebut. Rekomendasi ini penting untuk diikuti dengan evaluasi berkelanjutan agar dapat mengetahui tingkat capaian dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Pelaksanaan kebijakan yang efektif harus selalu disertai dengan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa tujuan strategis dapat dicapai dan pelayanan publik dapat ditingkatkan secara signifikan.

Secara keseluruhan, penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Bima menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui evaluasi dan peningkatan berkelanjutan, diharapkan Kabupaten Bima dapat mencapai standar yang lebih tinggi dalam penerapan e-Government, mendukung reformasi birokrasi, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat (Darmawan et al., 2020).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE di Kabupaten Bima: Implikasi terhadap Efektivitas Pelayanan Publik

Dengan fokus pada inovasi, produktivitas, dan inklusivitas, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang lebih efisien dan responsif, sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan (Koniyo, 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena kompleks secara mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan para ahli dan tinjauan literatur untuk mendapatkan perspektif langsung dan luas. Sumber data mencakup data primer, seperti hasil wawancara dan temuan lapangan, serta data sekunder dari jurnal, tesis, disertasi, artikel berita, dan data statistik. Pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber resmi, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, laporan tahunan Ombudsman, dan Dokumen Kinerja Instansi Pemerintah Daerah atau Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Validitas data dijamin dengan teknik triangulasi, yang menggabungkan berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Selain itu, model analisis data interaktif digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasi data secara mendalam, memungkinkan eksplorasi hubungan antar variabel dan menghasilkan pemahaman komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Identifikasi Aspek dan Indikator SPBE di Kabupaten Bima

Penilaian penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bima pada tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2023. Peraturan ini menyediakan peta jalan dan kerangka evaluasi untuk mengukur sejauh mana penerapan SPBE telah berhasil diimplementasikan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Struktur penilaian SPBE terdiri dari domain, aspek, serta indikator yang terperinci, dengan tujuan memberikan panduan yang jelas dan terukur dalam menilai kinerja SPBE. Peraturan terbaru ini memperkenalkan beberapa domain dan aspek baru, yang sebelumnya tidak ada dalam peraturan lama (PermenPANRB No. 5 Tahun 2018), untuk mencerminkan perkembangan dan kebutuhan yang lebih modern dalam tata kelola pemerintahan elektronik.

Penilaian SPBE 2024 menunjukkan bahwa evaluasi ini mencakup empat domain utama: kebijakan internal, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE. Masing-masing domain memiliki bobot persentase yang berbeda, mencerminkan pentingnya masing-masing area dalam keseluruhan penerapan SPBE. Domain kebijakan internal mencakup aspek-aspek seperti regulasi dan kebijakan yang mendukung SPBE, serta komitmen pimpinan dalam implementasi SPBE. Domain ini penting karena memberikan landasan hukum dan administratif yang diperlukan untuk mendukung penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Dengan regulasi yang kuat, pemerintah dapat memastikan bahwa semua inisiatif SPBE berjalan dalam kerangka hukum yang jelas dan mendukung.

Domain kedua, yaitu tata kelola SPBE, berfokus pada struktur, proses, dan mekanisme yang diterapkan untuk mengelola SPBE secara efektif. Aspek-aspek dalam domain ini meliputi perencanaan strategis, pengelolaan risiko, serta pengawasan dan evaluasi berkala. Tata kelola yang baik memastikan bahwa SPBE tidak hanya diterapkan dengan benar, tetapi juga dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Di Kabupaten Bima, tata kelola SPBE mencakup berbagai inisiatif untuk memastikan koordinasi yang baik antar departemen, penggunaan sumber daya yang efisien,

serta penerapan praktik terbaik dalam pengelolaan teknologi informasi. Dengan demikian, tata kelola yang efektif mendukung keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang dari program SPBE.

Domain ketiga adalah manajemen SPBE, yang mencakup aspek penerapan manajemen dan audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Domain ini baru diperkenalkan dalam PermenPANRB Nomor 23 Tahun 2023, dan bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen TIK dilakukan dengan cara yang terstruktur dan profesional. Aspek manajemen mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek TIK, sementara aspek audit berfokus pada evaluasi kinerja dan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Dengan adanya manajemen dan audit TIK, pemerintah Kabupaten Bima dapat memastikan bahwa inisiatif SPBE berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Pengelolaan yang baik juga memungkinkan deteksi dini terhadap masalah dan implementasi perbaikan yang cepat.

Domain terakhir adalah layanan SPBE, yang mencakup semua layanan publik yang disediakan melalui platform digital. Aspek-aspek dalam domain ini meliputi aksesibilitas, kualitas layanan, serta kepuasan pengguna. Penilaian terhadap layanan SPBE bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan pemerintah secara online, dan bahwa layanan tersebut berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Di Kabupaten Bima, layanan SPBE mencakup berbagai sektor, termasuk administrasi kependudukan, perizinan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan meningkatkan kualitas layanan SPBE, pemerintah Kabupaten Bima berharap dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Penggunaan teknologi dalam layanan publik diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi.

Secara keseluruhan, penilaian penerapan SPBE di Kabupaten Bima didasarkan pada 45 indikator yang mencakup keempat domain utama tersebut. Indikator-indikator ini memberikan panduan yang jelas dan rinci untuk mengukur kinerja SPBE di setiap aspek yang relevan. Misalnya, indikator dalam domain kebijakan internal mungkin mencakup jumlah regulasi yang mendukung SPBE, sementara indikator dalam domain layanan SPBE mungkin mencakup tingkat kepuasan pengguna atau jumlah layanan yang tersedia secara online. Dengan menggunakan indikator-indikator ini, pemerintah Kabupaten Bima dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan penerapan SPBE. Proses evaluasi yang menyeluruh ini memastikan bahwa pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas dan efektivitas SPBE.

Penilaian SPBE yang komprehensif ini tidak hanya memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana SPBE telah diimplementasikan, tetapi juga membantu dalam merencanakan langkah-langkah perbaikan di masa depan. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan dalam penerapan SPBE, pemerintah Kabupaten Bima dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Pada akhirnya, tujuan utama dari penilaian SPBE adalah untuk memastikan bahwa pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Peningkatan berkelanjutan dalam penerapan SPBE diharapkan dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih modern dan inovatif.

Penilaian Penerapan SPBE di Kabupaten Bima

Penilaian penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bima pada tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2023. Evaluasi ini menggunakan kerangka evaluasi untuk mengukur tingkat kematangan SPBE, dengan melibatkan evaluator internal

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE di Kabupaten Bima: Implikasi terhadap Efektivitas Pelayanan Publik

dan eksternal serta metode penilaian yang terinci. Hasil evaluasi menunjukkan nilai indeks SPBE Kabupaten Bima pada tahun 2024 sebesar 2.05 dengan predikat "Cukup", menyoroti kebutuhan akan peningkatan pada beberapa aspek, terutama dalam manajemen SPBE.

Salah satu domain yang menunjukkan nilai rendah adalah manajemen SPBE, terutama dalam aspek Audit TIK. Evaluasi Audit TIK memperhatikan pelaksanaan audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE. Kabupaten Bima masih memiliki kekurangan dalam manajemen audit yang memadai dan pembuktian indikator yang dipenuhi, khususnya pada infrastruktur TIK. Survei parameter infrastruktur menunjukkan beberapa kelemahan, seperti kekurangan backup link untuk jaringan antar kantor pusat dan daerah, serta penggunaan firewall yang belum optimal.

Meskipun demikian, Kabupaten Bima memiliki keunggulan dalam Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik, tercermin dari nilai 2,9 pada domain tersebut. Layanan-layanan seperti perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, hingga pengelolaan barang milik negara telah mencapai tingkat kematangan yang cukup matang. Keunggulan ini disokong oleh aplikasi modern seperti SIGESIT, SANTABE, LAMBARASA, ARLOOPA, dan SIDAK yang telah terbukti efektif meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan keunggulan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima perlu melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem SPBE. Peningkatan kompetensi SDM, penguatan infrastruktur, dan pengembangan aplikasi menjadi kunci dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Bima tetap efektif, efisien, dan berkualitas, menjadikan Kabupaten Bima sebagai contoh keberhasilan dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis teknologi di tingkat daerah.

Penerapan SPBE di Kabupaten Bima tidak hanya terfokus pada administrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup sektor-sektor penting lainnya seperti administrasi kependudukan, perizinan, pendidikan, dan kesehatan. Evaluasi menunjukkan bahwa layanan publik berbasis elektronik telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam memastikan aksesibilitas dan kualitas layanan yang merata di seluruh wilayah.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi pengembangan TIK yang komprehensif, termasuk peningkatan infrastruktur jaringan dan pelatihan SDM di bidang TIK. Dengan peningkatan ini, diharapkan nilai indeks SPBE Kabupaten Bima dapat meningkat di masa depan, mencerminkan kemajuan dalam tata kelola pemerintahan elektronik dan pelayanan publik. Kabupaten Bima dapat mencapai kemajuan yang signifikan dengan fokus pada pengembangan TIK dan e-government, serta peningkatan kualitas layanan publik, memastikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Kesimpulan

Penilaian penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bima tahun 2024 menunjukkan nilai indeks sebesar 2.05 dengan predikat "Cukup". Meskipun terdapat kelemahan pada manajemen audit dan infrastruktur TIK, Kabupaten Bima memiliki keunggulan dalam Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik, tercermin dari nilai 2,9 pada domain tersebut. Aplikasi modern seperti SIGESIT, SANTABE, LAMBARASA, ARLOOPA, dan SIDAK telah membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk mempertahankan keunggulan ini, diperlukan pemeliharaan sistem SPBE, peningkatan kompetensi SDM, dan penguatan infrastruktur. Fokus pada pengembangan TIK dan e-government serta peningkatan kualitas layanan publik diharapkan dapat mengatasi tantangan yang masih ada, menjadikan Kabupaten Bima sebagai contoh keberhasilan dalam

Hidayatullah, Yudhi Lestanata, Ayatullah Hadi, Sadrul Imam

penerapan teknologi untuk pelayanan publik.

BIBLIOGRAFI

- Alshehri, A., Alharbi, S., Khayyat, M., & Aboulola, O. (2022). *Global E-government Trends , Challenges and Opportunities. January*. <https://doi.org/10.18421/SAR44>
- Amaliah, S. M., Hafiar, H., & Dewi, R. (2023). Analisis Aksesibilitas Website Pemerintah Provinsi Indonesia Sebagai Implementasi Corporate Digital Responsibility terhadap E-Government. *Prologia*, 7(2), 473–486. <https://doi.org/10.24912/pr.v7i2.24456>
- Ariana, S., Azim, C., & Antoni, D. (2020). Clustering of ICT human resources capacity in the implementation of E-government in expansion area: a case study from pali regency. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1754103>
- Arman, A., Ishaka, M., & Haeril, H. (2022). Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Kantor BPPKAD Kabupaten Bima). *YUME: Journal of ...*, 5(3), 245–250. <https://doi.org/10.37531/yume.vvix.547>
- Budai, B. B., & Tózsza, I. (2020). Regional inequalities in front-office services: Focus shift in e-government front offices and their regional projections in Hungary. *Regional Statistics*, 10(2), 206–227. <https://doi.org/10.15196/RS100212>
- Darmawan, A. K., Siahaan, D. O., Susanto, T. D., Walid, M., Umam, B. A., & Hidayanto, A. N. (2020). Identifying the Differing Service Maturity Levels of Mobile-based Smart Regency with e-Government Adoption Model (GAM) framework. *7th International Conference on ICT for Smart Society: AIoT for Smart Society, ICISS 2020 - Proceeding, November*. <https://doi.org/10.1109/ICISS50791.2020.9307540>
- Farida, I., Lampung, U. B., Setiawan, R., Maryatmi, A. S., & Juwita, N. (2020). The Implementation of E-Government in the Industrial Revolution Era 4.0 in Indonesia. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 22(2), 340–346.
- Fazil, A. W., Hakimi, M., Aslamzai, S., & Quch, M. M. (2024). A Review of E-Government Practices in the Age of Digitalization. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 2(02), 511–527. <https://doi.org/10.59653/ijmars.v2i02.568>
- Firman, F., Sahrul, S., & Ramadoan, S. (2023). Analysis of Efforts in the Development of Local Government: E-Government and Public Service Management. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 25–36.
- Firmandayu, N., & Elfaki, K. E. (2023). The Electronic Government Policy-Based Green Constitution Towards Good Governance. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*, 1(2), 108–121. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v1i2.11>
- Gaufman, E. (2020). Cybercrime and Punishment: Security, Information War, and the Future of Runet. In *The Palgrave Handbook of Digital Russia Studies*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42855-6_7
- Gupta, R., Muttoo, S. K., & Pal, S. K. (2020). Regional E-governance development index for developing nations. *Digital Government: Research and Practice*, 1(3). <https://doi.org/10.1145/3386163>
- Haerofiatna, H., & Chaidir, J. (2023). Regional Regulations: Implementation of Electronic-based Government System. *European Journal of Business and Innovation Research*, 11(3), 61–69. <https://doi.org/10.37745/ejbir.2013/vol11n36169>
- Hardi, R., & Gohwong, S. (2020). E-Government Based Urban Governance on the Smart City Program in Makassar, Indonesia. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 1(1), 12–17. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i1.10>

- Information, A. (2024). *E-Government, manajemen, Layanan Publik, Kabupaten Bima*. 4(6).
- Ingrams, A., Manoharan, A., Schmidhuber, L., & Holzer, M. (2020). Stages and Determinants of E-Government Development: A Twelve-Year Longitudinal Study of Global Cities. *International Public Management Journal*, 23(6), 731–769. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1467987>
- Karunia, R. L., Budiaji, R., Suzana, R., Dewi, K. S., & Prasetyo, J. H. (2023). Analysis of the Factors that Affect the Implementation of E-Government in Indonesia. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(3), 46–54. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i3.1216>
- Koniyo, M. H. (2021). Identification of components for evaluation e-government governance framework according to regional government characteristics. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1098(3), 032073. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/1098/3/032073>
- Kuswati, Y., Hartati, T., & Kusmayadi, D. (2022). Implementation of E-Government-Based Policies in Improving Public Service Satisfaction in the Majalengka Regency Local Government. *International Journal of Social Science and Business*, 6(3), 385–394. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v6i3.44831>
- Li, S., Wei, W., & Ma, M. (2021). How Does E-Government Affect Corruption? Provincial Panel Evidence from China. *IEEE Access*, 9, 94879–94888. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3093981>
- Lytras, M. D., & Şerban, A. C. (2020). E-Government Insights to Smart Cities Research: European Union (EU) Study and the Role of Regulations. *IEEE Access*, 8, 65313–65326. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2982737>
- Matitah, M., Arifin, S., Sumarto, S., & Widiyanto, W. (2021). Confronting E-Government Adoption in Indonesian Local Government. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 6(2), 279–306. <https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.47795>
- Maulana, R. Y. (2020). Collaborative Governance in the Implementation of E-Government-Based Public Services Inclusion in Jambi Province, Indonesia. *Journal of Governance*, 5(1), 91–104. <https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.7317>
- Maulana, R. Y., & Bafadhal, F. (2020). *Provision of Access to Information Services Based on E-Government in the Village Government*. 439(Ticash 2019), 219–223. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200515.037>
- Pakhalov, A. M., Rozhkova, N. A., & Alexopoulos, C. (2020). Assessing the quality of e-Government services for entrepreneurship: A comparative study in Russia's regions. *ACM International Conference Proceeding Series*, 315–325. <https://doi.org/10.1145/3428502.3428546>
- Prihanto, I. G. (2012). Analisis Implementasi E-Government Pada Pemerintah. *Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan*, 1–16.
- Roblek, V., Bach, M. P., Meško, M., & Bertonsel, T. (2020). Best practices of the social innovations in the framework of the e-government evolution. *Amfiteatru Economic*, 22(53), 275–302. <https://doi.org/10.24818/EA/2019/53/275>
- Rodriguez-Hevíá, L. F., Navío-Marco, J., & Ruiz-Gómez, L. M. (2020). Citizens' involvement in e-government in the European Union: The rising importance of the digital skills. *Sustainability (Switzerland)*, 12(17). <https://doi.org/10.3390/SU12176807>
- Saputra, T., & Frinaldi, A. (2023). Systematic Literature Review Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital. *Menara Ilmu*, 17(1), 116–124. <https://doi.org/10.31869/mi.v17i1.4534>
- Suwarno, Y., & Wati, N. K. (2020). E-Government Institutional Capacity in Provincial Governments of West-Java and East-Java. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11(2). <https://doi.org/10.18196/jgp.112117>
- Ullah, A., Pinglu, C., Ullah, S., Qaisar, Z. H., & Qian, N. (2022). The dynamic nexus of E-

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE di Kabupaten Bima: Implikasi terhadap Efektivitas Pelayanan Publik

- Government, and sustainable development: Moderating role of multi-dimensional regional integration index in Belt and Road partner countries. *Technology in Society*, 68(January), 101903. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.101903>
- Utama, A. . G. S. (2020). The implementation of e-government in indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 9(7), 190–196. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.929>
- Vázquez-López, A., & Marey-Perez, M. (2021). Factors affecting e-government adoption by dairy farmers: A case study in the north-west of Spain. *Future Internet*, 13(8). <https://doi.org/10.3390/fi13080206>
- Ziemba, E., & Papaj, T. (2012). E-government application at the regional level in Poland-The case of SEKAP. *2012 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS 2012*, 1047–1054.

Copyright holder:

Hidayatullah, Yudhi Lestanata, Ayatullah Hadi, Sadrul Imam (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

